

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



**RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JAMBI T.A. 2022**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2022 merupakan tahun Ketiga dalam Tahapan Rencana Strategis Polri 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2021 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A. 2022. Rencana Kerja Polri T.A. 2022 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Polri 2020-2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2022 disusun dengan memperhatikan PPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban; dan (5) pilar keamanan Siber.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun

terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis

keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran *Covid-19* dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis, baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polda T.A. 2022.

Bidhumas Polda Jambi sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf bertugas melakukan diseminasi informasi tentang kinerja Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat yang merupakan salah satu syarat untuk tercapai keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara Kamtibmas, Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.

Masyarakat membutuhkan tanggung jawab mutlak seluruh personil Polri baik sebagai individu maupun lembaga. Sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab adalah melalui tampilan tugas yang profesional, transparan dan akuntabel serta bisa diterima masyarakat, dan salah satu yang berperan penting serta menjadi tugas pokok dan fungsi untuk mencapai hal tersebut adalah fungsi bidang Humas dalam membangun gambaran dan kepercayaan masyarakat (*image building and trust building*) terhadap Polri.

Polri bertindak sebagai mediator serta fasilitator antara badan publik (Polri) dengan masyarakat, Humas Polri menjadi pintu utama distribusi dan desiminasi informasi, dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010

tentang susunan organisasi dan tata laksana kerja satuan organisasi tingkat Polda telah dimasukkan pada setiap satuan kerja sebuah fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID). Demikian juga untuk pengemban fungsi bidang Humas telah distrukturkan sampai pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), dimana salah satu perannya adalah mengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Bidhumas Polda Jambi disusun sesuai tugas pokok dan fungsi bidang Humas dengan memperhatikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bidhumas Polda Jambi 2020-2024 sebagai berikut :

a). Tugas

Bidhumas Polda Jambi merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang Hubungan Masyarakat pada tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat

b). Fungsi

- 1). Perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi humas Polri;
- 2). Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberiarahan/kebijakan guna menjamin terlaksananya fungsi humas;
- 3). Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir personil pengemban fungsi humas;
- 4). Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pengemban fungsi humas;
- 5). Perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang kehumasan;

- 6). Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Bidhumas Polda Jambi;
- 7). Penerangan umum untuk membentuk opini positif bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri;
- 8). Penerangan satuan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidhumas Polda Jambi maka setiap tahun perlu disusun Rancangan Renja sebagai bahan dalam rangka penyusunan Renja untuk memproyeksikan rencana kerja tahun yang akan datang dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran ideal selama satu tahun.

2. Analisis SWOT

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

- a). Kekuatan
 - 1). Personel Bidhumas Polda Jambi berjumlah 26 orang dengan komposisi, Polri sebanyak 17 orang yang terdiri dari 4 Pamen, 1 Pama dan 12 orang Bintara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri sebanyak 9 orang yang terdiri dari 2 orang Pembina (golongan IV) dan 7 orang penata (golongan III).
 - 2). Polri telah memiliki struktur organisasi Humas lengkap mulai dari Unit terdepan/Ujung Tombak (Polsek) sampai dengan tingkat Pusat (Mabes Polri) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 - 3). Organisasi Polri yang tersebar dari tingkat pusat hingga dengan ujung tombaknya yakni Polsek dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai basis komunikasi antara Polri dan masyarakat melalui media massa/pers;
 - 4). Kebijakan pimpinan untuk memaksimalkan peran Humas Polri sebagai juru bicara Polri atau penjuror dalam membangun opini publik yang positif terhadap kinerja Polri;

- 5). Adanya semangat/motivasi untuk meningkatkan etos kerja oleh Humas Polri dalam mengabdikan diri pada tugas dan fungsi yang diembannya dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik melalui pendidikan formil maupun non formil;
 - 6). Tersedianya perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Polri, meskipun terbatas.
- b). kelemahan
- 1). Pelayanan terdepan (Polres), namun belum seluruh Unit Organisasi Fungsi Humas terisi baik dengan SDM, Sarana Prasarana, maupun anggaran yang memadai;
 - 2). kondisi personel Humas Polri saat ini belum berdasarkan kompetensi ;
 - 3). sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dibidang komunikasi, Jurnalistik maupun kehumasan masih terbatas sehingga masih dirasa belum optimal;
 - 4). pemahaman dan pemberdayaan peran kehumasan di jajaran organisasi Polri masih sangat terbatas, sehingga peran Humas belum dimanfaatkan secara maksimal;
 - 5). penempatan personel pada Bidhumas Polda Jambi maupun belum sesuai kompetensinya;
 - 6). Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) yang ditunjuk perlu ditingkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Divhumas Polri sehingga diharapkan dapat berperan sebagai kontributor informasi/data internal Polri untuk keperluan pencitraan Organisasi;
 - 7). Masih kurangnya inofasi dalam bidang multimedia khususnya pembuatan aplikasi yang memuat data pelanggaran anggota yang dapat di akses dengan mudah sehingga apabila Humas membutuhkan data dimaksud tinggal membuka aplikasi pada satker pengawasan;
 - 8). Penempatan personil secara tepat sesuai kompetensinya masih belum sesuai harapan;
 - 9). Keterbatasan jumlah almatsus fungsi Humas Polri seperti Kamera digital, kamera video digital, peralatan editing, Ranmor

R 2 dan R 4 pendukung mobilitas untuk peliputan kegiatan Polri di lapangan, dapat menyebabkan terganggunya upaya pengemban fungsi Humas Polri untuk menyediakan informasi bagi pimpinan Polri dan masyarakat secara optimal;

- 10). Fileing and Recording data kegiatan operasional dan Pembinaan serta produk–produk administrasi masih terbatas.
- 11). Belum memiliki mini studio baik foto dan video untuk keperluan pembuatan film yang dapat ditayangkan di media TV, Radio, media streaming dan video tron sehingga menyulitkan pembuatan foto dan film yang dapat mendukung penyebaran/diseminasi informasi;

c). Peluang

- 1). kemajuan teknologi informasi dewasa ini membawa pengaruh kepada personel Humas Polri sehingga cepat mengetahui berbagai informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi melalui media massa baik cetak, elektronik dan media on line;
- 2). Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Kominfo menyelenggarakan rapat dan pertemuan melalui wadah Bakohumas, memberikan peluang bagi pengemban fungsi Humas Polri untuk mengembangkan kemitraan sekaligus melakukan diseminasi informasi tentang kinerja Polri.;
- 3). pada umumnya masyarakat memiliki perhatian, ketertarikan dan hasrat yang tinggi untuk mengetahui kinerja Polri, baik dalam penanggulangan berbagai kriminalitas maupun dalam pelayanan masyarakat, sehingga wajar bila Polri menjadi primadona bagi kalangan pers/media;
- 4). meningkatnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana teknologi dan informasi dalam berkomunikasi, seperti dengan e-mail, website, dan jejaring social lainnya untuk mendapat informasi dan memberikan informasi secara terbuka;
- 5). adanya program pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan/kompetensi personel melalui berbagai kemitraan/kerjasama dalam rangka capacity building dengan Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian Lembaga;

- 6). Beragamnya keberadaan media massa baik cetak, elektronik dan online yang ada pada saat ini merupakan peluang besar bagi Polri untuk menjalin kerjasama dalam mewujudkan opini publik yang positif;
 - 7). Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong Polri lebih transparan, demokratis dan akuntabel dalam penyampaian/penyebaran/diseminasi informasi berkaitan dengan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Polri;
 - 8). meningkatnya daya kritisi masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara termasuk hak untuk memperoleh Layanan an informasi dari penyelenggara Negara/Badan Publik (Polri);
 - 9). Pesatnya perkembangan penggunaan media sosial saat ini dimasyarakat merupakan sarana milik publik yang dapat dijadikan oleh Humas Polri sebagai media dalam proses penyampaian/ penyebaran/ diseminasi informasi.
- d). Tantangan (threats)
- 1). pers/media memandang Polri sebagai badan publik yang besar dan memiliki kewenangan luas, sehingga perlu diawasi/dikontrol oleh masyarakat dan pers;
 - 2). Dalam penentuan agenda seting media yang ada terkadang kita melihat adanya berbagai muatan kepentingan kelompok tertentu yang dapat menjadikan Polri sebagai objek pemberitaan dan berpotensi terwujudnya opini publik yang negatif terhadap Polri;
 - 3). ketatnya persaingan “rating” antar media sehingga ada kecenderungan media tertentu ingin lebih eksklusif, lebih cepat, lebih unik dengan mengabaikan obyektifitas berita itu sendiri;
 - 4). trial by press. Pers masih sering menyajikan berita – berita yang sudah menjustifikasi seseorang sebagai tersalah sebelum mekanisme hukum menentukan kesalahan seseorang (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah);

- 5). pemberitaan yang mencampuradukkan fakta dengan opini atau asumsi oleh kalangan pers baik media cetak maupun elektronik, memerlukan peningkatan hubungan kritis yang konstruktif dengan kalangan pers/media;
- 6). netralitas wartawan. Adanya oknum pers yang mencari informasi atas pesanan orang/pihak tertentu yang berujung pada praktek manipulasi data/informasi (berita pesanan);
- 7). pers/media memposisikan diri sebagai : watchdog (bak anjing menggonggong ketika melihat penyimpangan), marketplaces of ideas (ruang penyampai ide/gagasan oleh siapa saja terutamabila ada permasalahan menyangkut kepentingan publik) dan sebagai the fourth estate/pilar ke-empat demokrasi (tetap dianggap berperan ketika fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dianggap tidak berfungsi lagi);
- 8). Cara kerja media sudah pada posisi proaktif dalam menentukan rencana pemberitaan mulai dari menentukan Agenda Setting, angle dan focus bidikan beritanya sehingga lebih mengarah News Making bukan News Finding. Karena itu Polri harus berkemampuan dalam Forecasting Analysis dan Effective Anticipation, agar satuan-satuan lapangan tampil lebih efektif dan profesional khususnya dalam penanganan masalah/kasus yang menjadi sorotan pers/media
- 9). Masih terdapatnya media massa yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok Polri, termasuk adanya informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hal tersebut berdampak kepada penyajian berita yang mengabaikan tentang kerahasiaan.

3. Identifikasi Masalah

Setelah mencermati beberapa aspek yang mempengaruhi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Bidhumas Polda Jambi, selanjutnya melalui Analisa SWOT maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dan mungkin terjadi pada tahun 2022 yaitu:

a. Internal

- 1). Dengan diterbitkannya Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang Struktur organisasi dan tata kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor diharapkan fungsi Humas di Satuan kewilayahan terutama ditingkat Polres dan Polsek dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008;
- 2). Belum maksimalnya sistem pengelolaan informasi antar pengemban fungsi PID pada Satuan Kerja di Mabes Polri dan Satuan Wilayah (Polda dan Polres);
- 3). Pembinaan karier di lingkungan Bidhumas Polda Jambi masih belum memberikan dampak untuk memotivasi peningkatan kinerja;
- 4). Sudah dibuatnya piranti lunak/produk-produk berupa Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kadiv Humas yang mengatur tentang mekanisme SOP dibidang Fungsi Humas;
- 5). Sarana dan Prasarana Teknologi informasi dan komunikasi yang telah tergelar mulai Mabes Polri sampai ketinggian Polres masih belum optimal dimanfaatkan, sehingga diseminasi/penyebaran informasi dari Mabes Polri ke Satuan Wilayah sampai tingkat Polsek atau sebaliknya masih belum maksimal;
- 6). Minimnya dukungan anggaran bidang Humas di Kewilayahan khususnya Polres dan Polsek sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kesatuan.

b. Eksternal

- 1). Layanan Pengaduan/permintaan informasi masyarakat yang sudah ditindaklanjuti ke Satuan Kerja yang berkompeten masih belum semuanya mendapatkan tanggapan dan perhatian yang serius, sehingga dapat menurunkan citra positif institusi/organisasi;
- 2). Belum dapat memanfaatkan secara maksimal kemitraan dengan media massa (media relations) dalam meningkatkan

citra positif Polri melalui Pemberitaan di media cetak dan elektronik termasuk media online dan sosial yang sifatnya softnews berkaitan dengan kinerja Polri di bidang pembinaan dan operasional;

- 3). Belum semua Kasatker dan Kasatwil memahami tentang pentingnya media massa sebagai sarana penyampaian informasi kinerja Kepolisian kepada masyarakat;
- 4). Adanya kecenderungan media massa memberitakan isu negatif tentang Polri akibat masih banyaknya penyimpangan, kesalahan dan kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat disetiap fungsi pelayanan. Hal ini belum dihadapi dengan suatu strategi Humas melalui pembuatan prodok-prodok menjelaskan tentang prestasi kehumasan yang dapat kinerja Polri didukung komentar/pendapat para ahli yang berkompeten dan tokoh masyarakat yang berpengaruh.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Visi Polda Jambi

Terwujudnya Jambi yang aman dan tertib.

b. Misi Polda Jambi

”Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas dan menegakkan Hukum”.

c. Visi Bidhumas Polda Jambi.

Visi Bidhumas Polda Jambi 2020-2024 merupakan penjabaran dari Visi Polri. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Bidhumas Polda Jambi maka dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan Bidhumas Polda Jambi yang Profesional, Unggul dan Dipercaya dalam Pengelolaan Informasi Tentang Kinerja Polri ”.

d. Misi Bidhumas Polda Jambi.

Dengan mempedomani Visi Bidhumas Polda Jambi, maka langkah pencapaian sasaran disusun ke dalam misi sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;
- 2). Meningkatkan dan menyempurnakan sistem dan metode yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;
- 3). Memenuhi dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;

- 4). Mengusulkan kebutuhan anggaran yang dapat mendukung melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

2. Tujuan

a. Tujuan Polda Jambi

- 1). menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban masyarakat di seluruh Daerah Jambi;
- 2). menegakkan Hukum secara berkeadilan;
- 3). modernisasi pelayanan Polri di Polda Jambi;
- 4). mewujudkan Polri yang profesional;
- 5). menerapkan manajemen Polri di polda Jambi yang terintegritas dan terpercaya.

b. Tujuan Bidhumas Polda Jambi

- 1). Tercapainya peningkatan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;
- 2). Tercapainya peningkatan dan penyempurnaan system dan metode Bidhumas Polda Jambi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;
- 3). Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- 4). Terpenuhinya kebutuhan anggaran yang dapat mendukung melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Jambi

Untuk Polda Jambi, Sasaran Prioritas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1). terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2). terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3). terselenggaranya layanan publik Polri yang prima;
- 4). modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini;
- 5). terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal;
- 6). terwujudnya SDM Polri yang profesional;
- 7). terwujudnya good governance;
- 8). terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;
- 9). terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel.

b. Sasaran Prioritas Bidhumas Polda Jambi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi bidang Humas di lingkungan Polri maka sasaran yang diprioritaskan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1). tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personel yang lebih efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas dibidang fungsi humas dalam memberikan pelayanan informasi, penyebaran/disememasi informasi serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- 2). terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dibidang fungsi kehumasan berupa kemampuan jurnalistik, publik speaking, media handling, fotografi, videografi dan desain grafis;
- 3). memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik, media social dan media online;

- 4). tersusunnya piranti lunak berupa Peraturan Kapolri dan Peraturan Kadiv Humas yang mengatur tentang mekanisme Prosedur Tetap (Protap) dibidang Fungsi Humas;
- 5). menjadikan Bidhumas Polda Jambi sebagai sumber informasi yang obyektif, dipercaya, partisipatif, responsif, humanis, transparan dan akuntabel;
- 6). melaksanakan supervisi staf pada Polda secara selektif dalam rangka peningkatan kinerja Bidhumas Polda dan Polres;
- 7). Terwujudnya kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan citra positif Polri melalui penyebaran/diseminasi informasi di media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media online dan media sosial.

III. ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jambi Tahun 2022

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Jambi Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”**, yaitu:
 - 1). penguatan peran Polri dalam menjaga Keamanan melalui Peningkatan Kemampuan Deteksi Aksi.
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 (*giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK/ prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131*);
 - b). melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 (*giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1 PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131*);
 - 2). meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
 (*giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 14, renaksi51, 55*);

- b). meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi65);
- c). penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang memiliki paham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 15, renaksi46, 47, 56,57, 59);
- d). menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarianisme yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi60, 61);
- e). patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media *online* dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi63);
- f). meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi64);
- g). melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;

- (*giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi65*);
- h). menetralsir dan menekan isu berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta membentuk jaringan media informasi;
(*giat3149, 3070/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13, giat43, renaksi151, 152, 155, 156, 159, 160, 161*);
- i). melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(*giat3155/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 13, 16, renaksi44, 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66*);
- j). meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;
(*giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi46*);
- k). meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(*giat5081/ prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi48*);
- l). meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata;
(*giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi50*);
- 3). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan "*pemolisian prediktif*" serta dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;
(*giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi46, 47*);
- b). melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu

Lintas;

(giat3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 6, giat12, 23, renaksi49, 91);

- 4). penanganan konflik secara humanis;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi60, 64, 65, 68);
 - b). mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; *(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1 /PPKprog5, giat14, renaksi54, 55, 67);*

- 5). meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi49);
 - b). meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8, giat12, 27, 28, renaksi49, 107, 112);
 - c). meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan

Kamseltibcarlantas;

(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12, 27, renaksi49,50,107);

- 6). meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat19, 20, renaksi74, 78);
 - b). menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan satwa;
(giat3130, 5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat19,20, renaksi74, 78);
 - c). memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9, giat30, renaksi123);
 - d). bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemi, gempa dan bencana;
(giat3072, 5076/prog1, 4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat32, renaksi31);

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum secara berkeadilan”**, yaitu:

- 1). peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*giat3143/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5, 6, giat16, 23, renaksi60, 61, 94, 95*);
 - b). meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
(*giat3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083,prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi85, 86, 87, 88, 94,95, 98, 106*);
 - c). meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanian, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(*giat3145/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi86, 109*);
 - d). melaksanakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(*giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi84*);
 - e). penanganan kejahatan pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(*giat3151/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi88*);

- f). meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(*giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi92, 93, 102*);
 - g). mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(*giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi89, 90, 108*);
 - h). memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(*giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi96*);
- 2). melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(*giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6, giat23, renaksi93*);
 - b). meningkatkan kemampuan pemeriksa Inafis dalam olah TKP;
(*giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6, giat23, renaksi93, 96*);
- 3). peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(*giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16, giat51, renaksi176, 177*);

- b). mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14, giat47, renaksi162, 163*);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Profesionalisme SDM”**, yaitu:
- 1). peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era *police* 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori pada seluruh pendidikan baik Diktuk dan pelatihan; (*giat5070/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4, renaksi13, 14*);
 - b). *upgrading* dan sertifikasi Gadik/Instruktur; (*giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi11, 13, 14*);
 - c). pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator; (*giat3100/prog3/SP1/SS1/IKU2/PPKprog3, giat4, Renaksi14*);
 - d). pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Bimmas; (*giat3100, 5076, 3130, 5087/prog3, 4/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4, renaksi14, 16, 76*);
 - e). peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri; (*giat3100, 3151, 3141/prog3, 5/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4, renaksi14*);
 - f). sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Ditpolairud serta Ditlantasi; (*giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog6, giat23, renaksi93, 153*);
 - g). desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi untuk

fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda;
(*giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi13, 76, 157*);

- 2). mengoptimalkan penggunaan aplikasi analisis beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker;
(*giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6, 7*);
 - b). pengembangan struktur organisasi Polri pada tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
(*giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog1, giat1, 2, renaksi2, 3, 4*);
 - c). mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
(*giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6, 7*);
- 3). melaksanakan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*); (*giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8, 9, 10, 12*);
 - b). melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(*giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi11*);

- c). meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang Kamtibmas;
(*giat3100, 5076/prog3, 4/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi16*);
- 4). peningkatan pelaksanaan tatakelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). mengembangkan Aplikasi Sirena secara bertahap;
(*giat3084, 4339/prog2,5/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9, renaksi33, 34*);
- b). mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi teknologi, baik *hardware* maupun *software* untuk mendukung aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*; (*giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9, renaksi33, 34*);
- c). pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(*giat4341/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog5, giat14, renaksi54, 55*);
- d). melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
(*giat3100, 4341/prog1,2/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4, renaksi13, 14*);
- e). peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri termasuk penanganan pasien Covid-19;
(*giat3072, 3100/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi11, 14*);
- 5). pelaksanaan Sistem Manajemen Karir berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

- a). menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*”;
(*giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat5, renaksi23*);
- b). membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “*program manajemen talenta*”;
(*giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat5, renaksi22*);
- c). mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP;
(*giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat5, renaksi18*);

- 6). peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a). melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS; (*giat3072/prog1/SP4/SS5/IKP12/PPKprog3, giat8, renaksi31*);
- b). melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan Asabri;
(*giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8, renaksi29*);
- c). peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(*giat5062, 3072, 5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8, renaksi 30,31*);

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Modernisasi teknologi**”, yaitu:

1. pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatasus Polri yang modern

guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a). pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 11, giat9,10,37,40 renaksi34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
- b). melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5062, 3133/prog2, 4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 12, giat10, 41,renaksi38, 145);
- c). pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;
(giat3084, 3133/prog2, 4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog6, giat23, renaksi91);
- d). pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk memberikan layanan kesehatan yang prima dalam penanganan pandemi Covid-19;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3, giat8, renaksi 30, 31, 118);
- e). pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa dan konflik sosial;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi37);
- f). pengembangan 110;
(giat3084,5055/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi36);
- g). pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir

sesuai dengan karakteristik wilayah;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi37);

2). Pembangunan dan penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan ;

a). melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9, renaksi34);

b). melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;

(giat5062/prog2/SP5/SS1, 4/IKP4/PPKprog4, giat9, renaksi36);

c). mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian;

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat11, renaksi41);

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani”**, yaitu:

1). penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a). klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;

(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,renaksi 150);

b). mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;

(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12, giat42, renaksi 149, 167);

c). percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*;

(*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat49,renaksi171, 172, 174*);

- d). pemasangan perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik; (*giat3091/prog1/SP6/SS45/IKP4/PPKprog15,giat50,renaksi175*);

2). penguatan Saber Pungli;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a). meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli dalam memberantas Pungli; (*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPK/PPKprog15,giat48,renaksi169*);
- b). membangun sistem pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15, giat48, renaksi168, 169*);
- c). meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli; (*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15, giat49, renaksi166, 170*);
- d). pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; (*giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog15, giat48, renaksi168, 169*);
- e). pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; (*giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog15, giat48, renaksi168, 169*);
- f). pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara

pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);
(*giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog16, giat51, renaksi176, 177*);

- g). terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;
(*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15, giat48, renaksi169*);
- 3). pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15, giat49, renaksi170, 173*);
- b). meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15, giat48, renaksi168, 169*);
- c). sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog14, giat47, renaksi165*);
- 4). meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri;

(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog4, giat10, renaksi38, 140);

- b). meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisien;
(giat4339/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog15,giat48,renaksi113, 129, 168);
 - c). meningkatkan sinergisitas dalam menyusun produk perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna mensinkronkan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;
(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47,renaksi163);
 - d). meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP8/PPKprog15,giat48,renaksi168);
 - e). melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran baik di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47,renaksi162);
- 5). penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a). pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat5052/prog1/SP6/SS5/IKP10, 12/PPKprog1, giat1, renaksi1, 2);
 - b). penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;

(giat5052/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1, giat1, renaksi3);

- 6). peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a). melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat138,renaksi140);

- b). melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11, giat38, renaksi139, 140);

- c). mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat39,renaksi140);

2. Bidhumas Polda Jambi

- a. Arah kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Jambi Tahun 2022

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Bidhumas Polda Jambi Tahun 2022, maka ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

- 1). Arah Kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas “tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personal yang lebih efektif”, yaitu :
 - a). mengedepankan Humas sebagai “ *Front Office*” yang berperan sebagai penjurur pencitraan yang professional, transparan dan akuntabel berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) yang tertata dalam system informasi terintegrasi (*networking*) dan terjalin dalam hubungan kemitraan sejajar serta menerima dan menyalurkan pengaduan, kritik, saran/masukan, dan aspirasi masyarakat dalam rangka pencitraan positif Polri; (SS1/IKP1)
 - b). Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia lembaga Humas Polri melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal;(giat3073/prog1)
 - c). Melaksanakan pembangunan/pemenuhan sarana dan prasarana pengelola informasi dan dokumentasi berbasis teknologi mulai dari tingkat pusat sampai dengan pelayanan terdepan (Polsek) secara bertahap dan berkesinambungan;
 - d). Pemenuhan dan peningkatan Pagu Anggaran sesuai kebutuhan ideal bagi terselenggaranya program dan kegiatan Humas Polri yang professional, transparan dan akuntabel; (giat5059,3073,3070,3149,5056/prog1,2)
 - e). Pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Humas; (SS1,IKP1,2,3,4)
 - f). Penguatan dan pengembangan organisasi Humas Polri di tingkat pusat dan kewilayahan sesuai dengan beban tugas, tuntutan tugas dan lingkungan strategis; (SS1,IKP1,2,3,4)

- g). meningkatkan kompetensi personel bidang Humas sampai dengan tingkat terdepan/ujung tombak Polsek (Sihumas); (giat3073/prog2)
- h). peningkatan pembinaan karier personel Humas didasarkan pada kaderisasi, kompetensi fungsi Humas dan prioritas mendapatkan kesempatan pendidikan pengembangan serta promosi jabatan;
- i). memanfaatkan dan meningkatkan peran serta media massa serta pemangku kepentingan dalam rangka membangun opini positif dan pencitraan positif organisasi Polri; (giat 3073,3070/prog2/SS1/IKP1/PPKprog13/giat44/Renaksi154,155,156)
- j). terbangunnya kemitraan dengan instansi terkait dalam dan luar negeri (K/L dan Non K/L) dalam penyelenggaraan dan pengembangan bidang fungsi Humas;
- k). meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja yang mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan kebutuhan organisasi Polri; (giat5059,3073,3070,3149,5056/ prog1,2/SS1/,IKP1,2,3,4)
- l). terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong Polri lebih profesional, transparan, demokratis dan akuntabel dalam penyebaran/ disemniasi informasi publik; (giat3149,5056/prog2/SS1/IKP1)
- m). peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi Humas yang siap menghadapi kondisi kontinjensi Kamtibmas, kejadian luar biasa melalui pengelolaan strategi komunikasi dan informasi serta

siap pada berbagai operasi kepolisian di dalam maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan ;

- (1). mengembangkan kemampuan dan kekuatan Personel dengan mengimplementasikan manajemen SDM Humas Polri yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan personel yang profesional, modern dan bermoral serta terpenuhinya kebutuhan SDM seluruh jajaran Humas Polri secara proporsional dan bertahap;
- (2). meningkatkan profesionalisme dan integritas penanggung jawab dan pelaksana manajemen program dan anggaran serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3). pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pusat sampai kewilayahan, dalam rangka penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (giat3073/prog2/SS1/IKP1,2,3,4)
- (4). pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- (5). pembangunan dan internalisasi budaya organisasi termasuk budaya pelayanan Humas Polri hingga ke tingkat Bidhumas Polda, Polres dan Polsek disertai dengan upaya *reward and punishment*;

- (6). mengembangkan sistem dan prosedur Bidhumas yang mampu mewujudkan manajemen Bidhumas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pembuatan produk Peraturan-peraturan; (SS1/IKP1)
- (7). analisa dan evaluasi pengembangan organisasi, sistem dan metoda, serta manajemen secara berkesinambungan; (giat3073/Prog2/SS1/IKP1,2,3,4)
- (8). membangun dan meningkatkan layanan pemerataan penyebaran/diseminasi informasi dalam rangka menciptakan opini positif Polri melalui kemitraan dengan media massa; (giat 3073,3070/prog2/SS1/IKP1 /PPKprog13 /giat44/Renaksi154,155,156)
- (9). melaksanakan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang komunikasi khususnya media massa baik cetak, elektronik dan media online serta media sosial; (giat 3073,3070/prog2/SS1 /IKP1 /PPKprog13 /giat44/Renaksi154,155,156)
- (10). meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dibidang fungsi Humas melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan;(giat3073/prog2/SS1/IKP1,2,3,4)
- (11). membangun dan mengembangkan sarana, prasarana serta kemampuan Bidhumas untuk mendukung tugas operasional kepolisian;
- (12). Meningkatkan kemampuan personel dalam pelaksanaan tugas-tugas peliputan sebagai bahan dokumentasi dan publikasi sekaligus sebagai bantuan teknologi dalam penyelidikan dan penyidikan; (giat3073/prog2/ PPK42/prog12 /renaksi148,149,150)

- (13). meningkatkan data base yang mampu untuk menyajikan layanan informasi dan dokumentasi tentang kinerja Polri kepada internal dan eksternal Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150)

- (14). mengembangkan dan peremajaan sarana dan prasarana PID yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150)

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1). Tujuan:

Bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Bidhumas Polda Jambi dan kewilayahan.

2). kegiatan:

1). Penerangan Masyarakat:

- a). Kegiatan Penerangan Umum;
- b). Kegiatan Penerangan Satuan;
- c). Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Informasi;

2). Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri:

- a). Pembayaran gaji dan tunjangan;
- b). Pengadaan perlengkapan /ATK Kantor
- c). Peningkatan layanan informasi publik melalui penyebaran / diseminasi informasi;
- d). Pemberitaan / publikasi kegiatan Polri melalui media massa, baik media cetak, elektronik maupun media online;
- e). Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev)
- f). Penerangan Satuan melalui cetak lembaran Pensat ke Satwil Polda Jambi
- g). Coffee Morning
- h). Pelaksanaan rakernis fungsi Humas
- i). Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi pengemban fungsi Humas
- j). Pembuatan dan pendistribusian kalender
- k). Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat staf
- l). Pelaksanaan operasional PPID
- m). Penyusunan Progam dan Renja

- n). Penyusunan dan evaluasi Lakip;
- o). Pelaksanaan Supervisi ke Satwil jajaran Polda Jambi

- 3). Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PID):
 - a). Kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID);
 - b). Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev);
 - c). Kegiatan Produksi dan Dokumentasi peliputan (Proddok);

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri

- 1). Perawatan kendaraan bermotor roda 4
- 2). Perawatan kendaraan bermotor roda 2
- 3). Perawatan peralatan kantor

2. Pagu Ideal Bidhumas Polda Jambi T.A. 2022

Pagu Ideal Bidhumas Polda Jambi T.A. 2022 sebesar Rp. 4.274.258.000,-(Empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen.

3070	Penerangan masyarakat	357.960.000
3073	Layanan perkantoran	3.752.009.000
3149	Pengelolaan Multimedia	25.489.000
5056	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	48.500.000
Jumlah.....		4.183.958.000

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri

5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	90.300.000
------	---------------------------------------	------------

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Bidhumas Polda Jambi Tahun 2022 untuk dapat dijadikan bahan dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : Juli 2021

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JAMBI

MULIA PRIANTO, S, Sos., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI 74100754

